

PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENERTIBAN DOKUMEN PENDUDUK PENDATANG

Alvadrian Yoel Bendri

NPP. 29.0586

Asdaf Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: alvadrianyoelbendri@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: This research focuses on the lack of community numbers, especially immigrants from outside the DKI Jakarta province who have not updated data on identity or resident documents. **Purpose:** The Research has done in purpose to finding out roled by Department of Population and Civil Registration DKI Jakarta Province about the issue of controlling documents for immigrant residents and to find out the supporting and inhibiting factors as well as the effort made in dealing with problem regarding in control of Immigrant Documents in DKI Jakarta Province. **Method:** This study uses qualitative research design with descriptive methods and inductive approach. Data collection techniques used is interview, observation and documentation techniques. The informants interviewed is The Head Of The Department of Population and Civil Registration Office, the Secretariat of the Population and Civil Registration Office, the Head of the Population Registration Division, the Head of the Civil Registration Division, the Head of the Population Movement Section, and several immigrant residents who took care of the population documents which the authors interviewed randomly. **Result:** The results showed that the role played by the Department of Population and Civil Registration in controlling immigrant population documents was good, but there were still inhibiting factors that needed to be overcome, namely the awareness of the immigrant population about the importance of managing immigrant population documents, and the awareness of the environmental head which was carried out directly in the community. smallest area. **Conclusion:** The role of the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta Province in controlling immigrant population documents is good but some improvements are needed, especially facilities and infrastructure that support digital services.

Keywords: *role, controlling imigrant resident document, immigrant*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini berfokus pada minimnya jumlah masyarakat khususnya pendatang dari luar Provinsi DKI Jakarta yang belum melakukan pemutakhiran data identitas atau dokumen kependudukan. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terhadap permasalahan penertiban dokumen penduduk pendatang dan untuk mengetahui

faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan mengenai Penertiban Dokumen Penduduk Pendatang di Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang peneliti wawancarai adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala Seksi Mutasi Penduduk, dan beberapa penduduk pendatang yang mengurus dokumen kependudukan yang penulis wawancarai secara acak. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban dokumen penduduk pendatang ini sudah baik, namun masih ada faktor penghambat yang perlu diatasi yaitu mengenai kesadaran penduduk pendatang akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan pendatang, dan kesadaran dari kepala lingkungan yang memantau secara langsung di wilayah terkecil. **Kesimpulan:** Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian dokumen kependudukan pendatang sudah baik namun perlu beberapa pembenahan terutama sarana dan prasarana yang mendukung layanan digital.

Kata Kunci : Peranan, Penertiban dokumen penduduk, penduduk pendatang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ruang Lingkup dalam kependudukan sangat banyak meliputi kelahiran hingga kematian. Salah satu ruang lingkup yang menimbulkan permasalahan bagi daerah – daerah tertentu adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan gerak atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk terbagi dalam mobilitas yang permanen dan bersifat sementara waktu, mobilitas penduduk permanen mengacu kepada perpindahan penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah yang lain dengan maksud untuk bermukim atau menetap (migrasi) sedangkan perpindahan penduduk yang tidak menetap atau tidak ada tujuan untuk tinggal permanen dikenal dengan mobilitas sementara (mobilitas sirkuler). Migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niatan menetap (Mantra, 2020).

Migrasi kemudian dapat dibagi menjadi migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi Nasional kemudian dapat dibedakan jenisnya menjadi transmigrasi hingga urbanisasi. Urbanisasi menurut definisinya yaitu perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat memilih untuk berpindah ke kota yang paling umum yaitu demi mendapat lapangan pekerjaan yang layak dan melihat bahwa terdapat banyak sekali tersedianya lapangan pekerjaan dengan upah standar yang dinilai tinggi bagi penduduk. Fenomena urbanisasi ini sering sekali dan mudah ditemukan di kota – kota besar di Indonesia yang menyebabkan banyak kesenjangan antara jumlah kepadatan penduduk di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 yaitu sebanyak 270,2 juta jiwa. Dari 270,20 juta penduduk Indonesia, sebesar 91,32 persen atau sekitar 246,74 juta penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK). Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik sebesar 8,68 persen atau sekitar 23,47 juta

penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK. Jumlah ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada KK. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan Kartu Keluarga disebabkan oleh perpindahan penduduk baik itu permanen maupun sementara. Tingginya minat masyarakat dalam melakukan urbanisasi berdampak pada persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga membuat beberapa Provinsi dan Kota di Indonesia mengalami kenaikan angka kepadatan penduduk.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa masih banyak penduduk datang yang tidak melaporkan kepada pihak terkait untuk dilakukan pendataan. Masalah tersebut menyebabkan banyaknya penduduk yang tidak terdata sebagai warga Jakarta sehingga dalam suatu wilayah jumlah penduduk berbeda dengan jumlah yang terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya hal ini juga yang membuat pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan optimal karena banyaknya temuan kasus kesalahan pada data kependudukan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan regulasi tahun 2004 yang dituangkan melalui Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 45 Tahun 2004 tentang Upaya Pengendalian Penduduk Akibat Migrasi Masuk Ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berisi instruksi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pendataan terhadap seluruh masyarakat di DKI Jakarta.

Menyandang status Jakarta sebagai Kota Metropolitan yang dapat menjadi faktor penarik bagi masyarakat luar Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak hingga menimbulkan angka urbanisasi tinggi dan berdampak pada kepadatan penduduk yang tinggi diharapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam mengatur permasalahan yang dapat terjadi akibat dari banyaknya penduduk pendatang. Permasalahan tersebut antara lain: pendirian pemukiman di tempat yang tidak layak, angka pengangguran yang tinggi, dan kriminalitas yang dapat mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu		Penelitian Saat Ini	
I Nengah Merta (2020)	Menganalisis implikasi pelayanan publik dalam penertiban penduduk pendatang Kota Denpasar	Alvadrian Yoel Bendri (2021)	Menganalisis peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan dokumen penduduk pendatang.

Ahmad Irwandi (2018)	Meneliti mengenai peran pemerintah khususnya desa adat dalam menertibkan dokumen penduduk pendatang Kabupaten Kampar.		Menganalisis peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan dokumen penduduk pendatang.
Aldila Marselli (2016)	Menganalisis upaya penertiban dokumen kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		Menganalisis peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan dokumen penduduk pendatang.
Intan Chairani Hasdi (2014)	Menganalisis mengenai pengendalian penduduk pendatang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Meneliti mengenai peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan dokumen penduduk pendatang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban dokumen penduduk pendatang. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dilihat dari sisi lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dibandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan seperti penelitian yang dilakukan oleh (I Nengah Merta, 2020) yang berlokasi di Kota Denpasar, lalu

penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Irwandi, 2018) yang dilakukan di Kabupaten Kampar. Selain kebaruan dalam hal lokasi penelitian, kebaruan juga di temukan pada metode penelitian yang digunakan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Aldila Marselli, 2016) dengan metode Yuridis Normatif, lalu (Intan Chairani Hasdi, 2014) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di rumuskan, maka adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui peranan dan mengetahui serta menganalisa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penertiban dokumen bagi penduduk pendatang. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan penertiban dokumen bagi penduduk pendatang.

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto. Dengan mengutamakan dimensi kedudukan, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dalam Penertiban Dokumen Penduduk Pendatang

Berdasarkan data-data yang terkumpul selama penelitian, dapat diuraikan ketiga dimensi tersebut dalam penertiban dokumen penduduk pendatang adalah **Kedudukan (Status)** berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kedudukan disini dapat diartikan sebagai posisi atau status lembaga yang mana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas kewajiban serta kewenangannya. Dimensi Kedudukan sendiri dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Tugas dan Fungsi, Hak dan Kewajiban dan Peran. Peran merupakan salah satu aspek yang menentukan suatu pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Peran ditentukan oleh aspek yang berjalan secara dinamis sehingga suatu pihak dapat menjalankan dua peran sekaligus yang dapat mendukung suatu tujuan dapat tercapai secara maksimal. **Kekuasaan (Power)** menurut pengertiannya adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak dari yang memiliki kekuasaan tersebut. Pentingnya kekuasaan diperlukan untuk dapat mempengaruhi pihak lain sebagai objek. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam konteks ini sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mempengaruhi pihak lain yaitu masyarakat untuk melakukan hal yang dikehendaki. Dinas Dukcapil tentunya memiliki kekuasaan untuk dapat mengatur masyarakat didasari oleh dasar hukum yang ada. Dasar hukum yang ada diperlukan agar dalam menjalankan kekuasaan, pihak yang dipengaruhi tidak diperlakukan semena-mena dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan. Standar Operasional Prosedur adalah salah satu bentuk nyata untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Setiap kegiatan dan kebijakan yang ada akan selalu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kekuasaan yang dilimpahkan kepada suatu lembaga tidak terlepas pula oleh pimpinan lembaga organisasi tersebut. Kualitas kepemimpinan dari kepala atau pimpinan lembaga organisasi sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu lembaga. Kekuasaan tidak dapat ditolerir dan di tawar oleh siapapun dengan berbagai alasan apapun dikarenakan terdapat peraturan yang mendasari dan termuat didalam kekuasaan. Pada dasarnya kekuasaan selalu dilandasi dengan dasar hukum yang kuat sehingga kekuasaan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peran yang ada. **Wewenang (Authority)** Wewenang merupakan hak yang termuat di dalam suatu peran yaitu dimana hak tersebut kemudian mendapatkan hasil dari berbagai macam aksi maupun reaksi dari pemegang peran, hak ini biasanya akan ditindak lanjuti dengan berbagai macam upaya untuk dapat mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan baik dari pemegang peran yang dimaksud.

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dalam Penertiban Dokumen Penduduk Pendatang

Peranan Dinas Dukcapil dalam penertiban dokumen penduduk pendatang dapat didukung dengan beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung tersebut tidak lain adalah dukungan dari pemerintah, koordinasi yang baik antar instansi, kinerja petugas, kelurahan dan desa. Berikut adalah uraian lengkapnya. Koordinasi Yang Baik antar Instansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melakukan koordinasi dengan instansi lain yang saling berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menunjang penertiban dokumen penduduk pendatang. Pada dasarnya koordinasi yang tercipta bertujuan untuk membantu Dinas Dukcapil untuk menjangkau masyarakat langsung melalui bidang yang melakukan koordinasi dengannya. Misalnya dengan Dinas Perhubungan, RSUD yang ada di DKI Jakarta, Perusahaan Negeri dan Swasta, Lembaga agama hingga koordinasi ke tingkat RT/RW. Sejauh ini koordinasi yang terbangun berjalan dengan baik. Terkadang memang ada hal-hal yang kurang sesuai tetapi masih dapat diselesaikan bersama. Kinerja Pegawai, Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta di lapangan yang dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai juga merupakan salah satu faktor pendorong penertiban dokumen penduduk pendatang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Inovasi yang Terus Dikembangkan, Berdasarkan apa yang didapatkan peneliti pada saat penelitian di lapangan, dengan adanya inovasi yang terus dikembangkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu faktor pendorong dalam penertiban dokumen penduduk pendatang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Inovasi yang dikembangkan dapat berupa dikembangkannya beberapa Aplikasi yang ada untuk menunjang penertiban dokumen penduduk pendatang ataupun dengan menerapkan beberapa prosedur yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian Faktor yang menghambat Peranan Disdukcapil Dalam Penertiban Dokumen Penduduk Pendatang di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah penjelasan dari kedua faktor tersebut. Terganggunya Sistem Informasi dan Teknologi, Salah satu faktor yang menghambat terkendalanya penertiban dokumen penduduk pendatang adalah dengan gangguan pada sistem informasi baik dari jaringan ataupun server termasuk permasalahan yang pada umumnya terjadi melalui teknologi digital. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kemudian faktor terbesar daripada penertiban dokumen penduduk pendatang adalah dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari masyarakat menjadi penyebab yang paling banyak ditemukan dari penertiban dokumen penduduk pendatang tersebut. Kurangnya Kesadaran Kepala Wilayah Setempat, Kurangnya kesadaran dari kepala lingkungan atau wilayah setempat dalam hal ini adalah Ketua RT/RW setempat. Banyak penduduk pendatang yang dibawa oleh sanak keluarga yang tinggal di Jakarta untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak. Namun masyarakat tersebut tidak ada kesadaran untuk melapor ditambah lagi Ketua RT/RW yang belum memiliki kesadaran untuk melaporkan mengenai kedatangan penduduk pendatang tersebut.

3.3 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dalam Penertiban Dokumen Penduduk Pendatang

Peran Dinas Dukcapil sangat penting dalam melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam Penertiban Dokumen Penduduk Pendatang yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dalam mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan berbagai usaha mulai dari pemerintah itu sendiri hingga ke masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil adalah sebagai berikut: Pengembangan dan Penyediaan Sarana Digital, Melakukan Sosialisasi Kepada

Masyarakat dan Kepala Lingkungan Setempat dan Melakukan Pengawasan Kepada Kepala Lingkungan dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian sebelumnya Menganalisis mengenai pengendalian penduduk pendatang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditemukan beberapa kekurangan diantaranya masih ada kekurangan pada pelaksana aturan yang kurang tegas dalam upaya pengendalian penduduk. Sementara dalam penelitian saat ini ditemukan kekurangan dalam indikator inovasi yang perlu beberapa peningkatan khususnya dalam bidang teknologi sehingga menunjang pelayanan dan penertiban penduduk pendatang secara daring.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa gambar dan beberapa data pendukung. Demi mendapatkan data tersebut maka penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diinginkan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah untuk mengetahui Peranan dari Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan dokumen kependudukan bagi penduduk pendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang berpedoman pada teori dan hasil penelitian di lapangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dalam Penertiban Dokumen Penduduk Pendatang. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Penertiban dokumen penduduk pendatang telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut. Dimensi Kedudukan yaitu indikator Tugas dan Fungsi, Hak dan Kewajiban, dengan kinerja dinas dukcapil sudah baik dibuktikan dengan pendataan penduduk pendatang pada tahun 2021 sudah tercatat dari setiap kota di DKI Jakarta. Kemudian indikator peranan pengaruh sudah baik dibuktikan dengan pelayanan terhadap penduduk pendatang.

Dimensi Kekuasaan dengan indikator Legalitas dan Otoritas dibuktikan dengan regulasi yang diberikan kepada dinas dukcapil untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta dengan pemberian tugas kepada suku dinas dukcapil yang berwenang melaksanakan tugas administrasi kependudukan di tingkat kota/kabupaten yang terlaksana dengan baik. Dengan indikator pengaruh sudah dikatakan baik dengan ditunjukkan penduduk pendatang yang banyak mengurus dokumen kepindahan serta dengan indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 97%

Dimensi Wewenang dengan indikator inovasi dikatakan baik dengan dibuktikan dari penerbitan aplikasi Data Warga yang memudahkan dalam pendataan penduduk pendatang hingga ke wilayah RT/RW. Indikator koordinasi dan pendelegasian dikatakan baik namun perlu ditingkatkan dengan adanya pengawasan dari tingkat disdukcapil provinsi.

Faktor penghambat yang ada dalam penertiban dokumen penduduk pendatang yaitu:

Terdapat pada sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana masih sering terjadi gangguan baik jaringan maupun server sehingga dapat menghambat proses dan ketepatan waktu pengurusan dokumen penduduk pendatang. Kemudian sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi digital masih diperlukannya lagi pengembangan dan penyediaan lebih banyak lagi agar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan maksimal. Faktor lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat pendatang yang mengatakan bahwa saat ini masyarakat pendatang masih banyak yang belum mengurus data KTP nya sehingga penduduk pendatang tersebut tinggal di DKI Jakarta tetapi data KTP nya masih berdomisili dari luar provinsi DKI Jakarta. Kurangnya kerjasama dengan pihak kepala lingkungan setempat untuk dapat melaporkan mengenai jumlah penduduk pendatang ke wilayah DKI Jakarta. Selain itu masih banyak juga kepala lingkungan setempat yang melakukan pembiaran terhadap penduduk pendatang tersebut padahal sudah jelas setiap warga penduduk pendatang wajib lapor 1x24 jam kepada kepala lingkungan di daerah tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah baik diantaranya yaitu: Pengembangan sarana dan prasarana serta melakukan pengecekan dan pembaruan terhadap perangkat digital meliputi jaringan dan perangkat yang dimiliki. Melakukan sosialisasi melalui media digital dengan menyediakan sosial media yang sering digunakan masyarakat sehingga informasi yang disampaikan mudah diakses dan dilihat oleh masyarakat. Kemudian menggunakan spanduk di sarana milik pemerintah dan kantor wilayah seperti kelurahan dan kecamatan. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala lingkungan sehingga pendataan penduduk pendatang dapat dilakukan di lingkungan satuan terkecil yaitu hingga wilayah lingkup RT/RW.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk penyediaan sarana prasarana yang banyak dan memiliki kualitas yang baik untuk menunjang pengurusan dokumen penduduk pendatang dari Dinas Dukcapil

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mantra, I. B. 2020. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Hasdi, Intan Chairani. 2014. *Pengendalian Penduduk Pendatang Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi pada Kecamatan Sumur Bandung)*. Sumedang: Universitas Padjajaran

Irwandi, Ahmad. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016*. JOM FISIP Vol. 5, Pekanbaru: Universitas Riau

Marselli, Aldila. 2016. *Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Semarang: Universitas Diponegoro

Merta, I Nengah. 2020. *Implikasi Pelayanan Publik Dalam Penertiban Penduduk Pendetang Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol. 34, Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan

